

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
PERIODE APRIL – JUNI 2023



PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II PERIODE APRIL – JUNI 2023

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Cikarang
pada hari Senin, 03 Juli 2023

Manager Reprtentative

ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.

Ketua Tim Survei

SARNI S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Cikarang



EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	21
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang berintegritas.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019..0

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner yang terdapat dalam aplikasi SiSUPER.
 - b. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden melalui aplikasi SiSUPER, yang terlebih dahulu mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dan mendapatkan pelayanan oleh Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 90 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, untuk memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

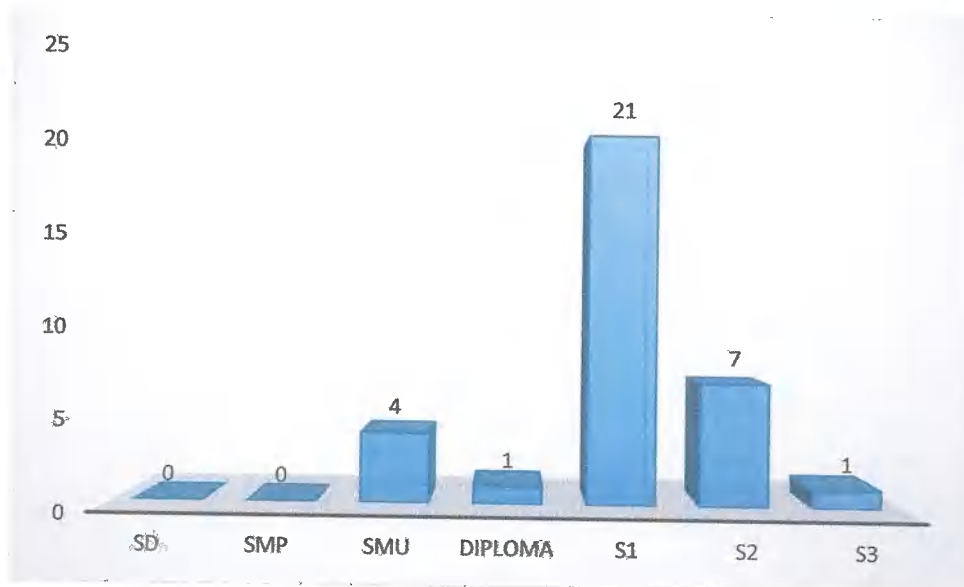
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sarjana Strata Satu yaitu sejumlah 21 (dua puluh satu) orang atau sebesar 61,76% (enam puluh satu koma tujuh puluh enam persen).

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

Seri... Ch...	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SMU	4	11,76
4	DIPLOMA	1	2,94
5	S1	21	61,76
6	S2	7	20,59
7	S3	1	2,94
	Total	34	100



3.1.2. Pekerjaan responden

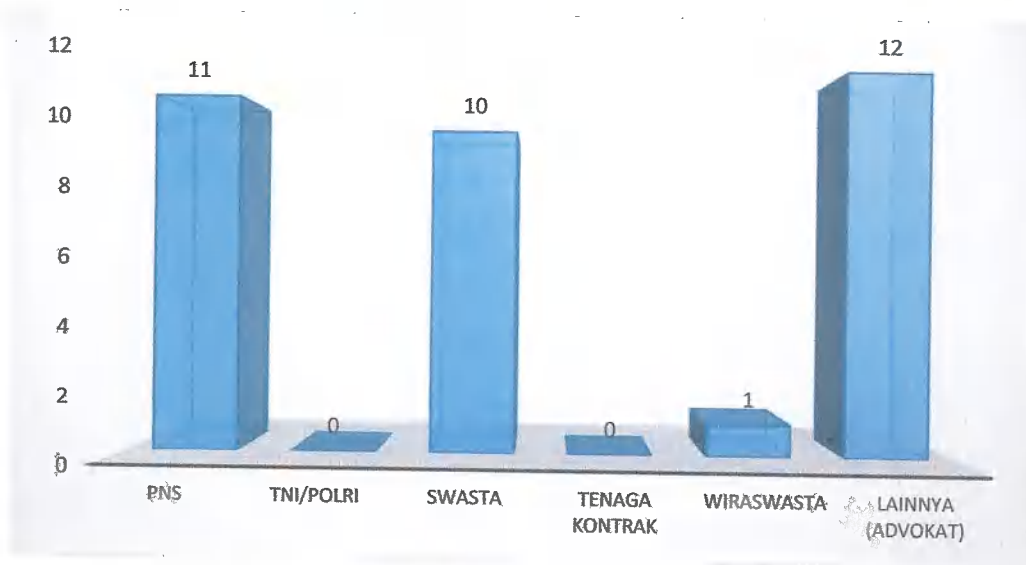
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang jenis pekerjaan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Advokat yaitu sejumlah 12 (dua belas) orang atau sebesar 35,29% (tiga puluh lima koma dua puluh sembilan persen).

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	11	32,35
2	TNI/POLRI	0	0
3	Swasta	10	29,41
4	Tenaga kontrak	0	0
5	Wiraswasta	1	2,94
6	Lainnya (Advokat)	12	35,29
	Jumlah	34	100

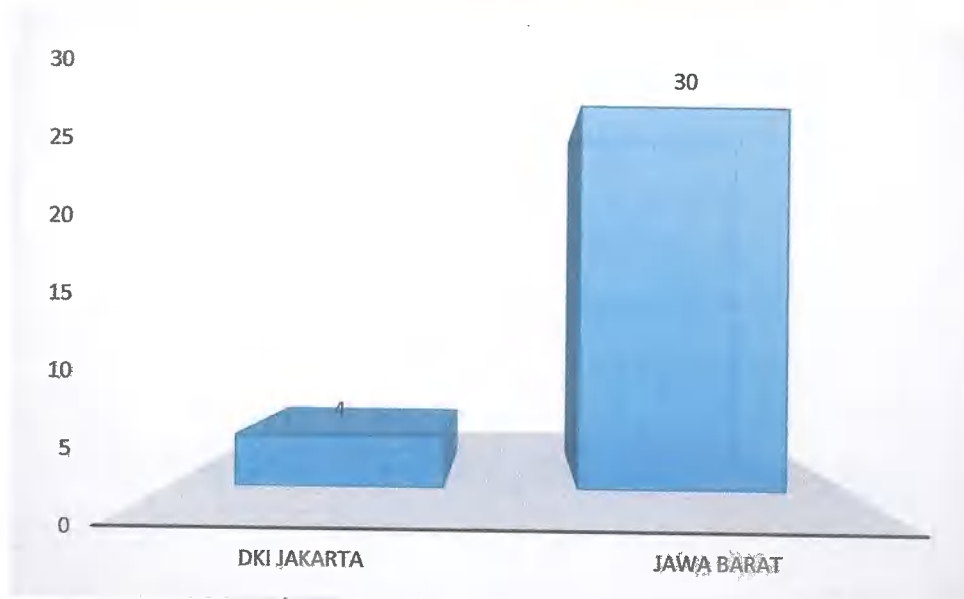


3.1.3. Domisili Responden

Dari sisi domisili responden, menunjukkan bahwa sebesar 88,24% (delapan puluh delapan koma dua puluh empat persen) atau sejumlah 30 (tiga puluh) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang berdomisili di Jawa Barat.

Tabel 6.
Domisili responden
 Responden menurut domisili

No	Domisili	Frekuensi	%
1	DKI Jakarta	4	11,76
2	Jawa Barat	30	88,24
	Jumlah	34	100



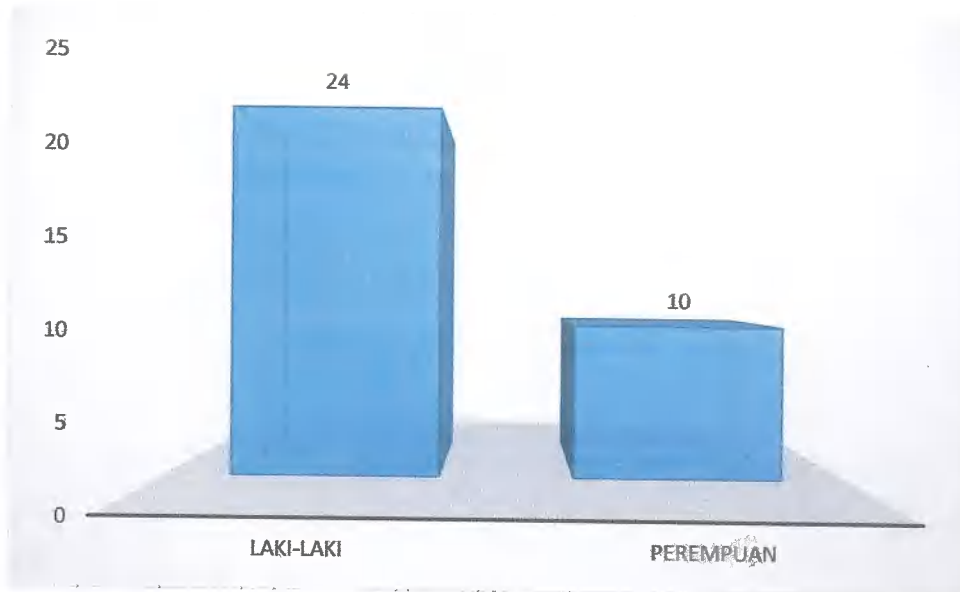
3.1.4. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik mayoritas pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebesar 70,59% (tujuh puluh koma lima puluh sembilan persen) atau sejumlah 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 7.
Jenis Kelamin

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	24	70,59
2	Perempuan	10	29,41
	Jumlah	34	100



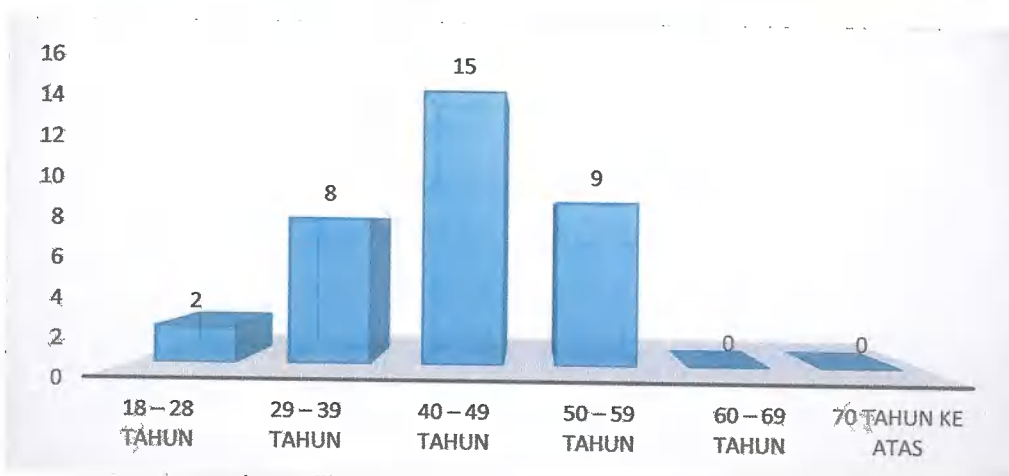
3.1.5. Kelompok usia responden

Dari segi usia responden, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang berada pada kelompok usia 40-49 Tahun sebesar 44,12% (empat puluh empat koma dua belas persen) atau sejumlah 15 (lima belas) orang.

Tabel 8.
Kelompok usia

Responden menurut kelompok usia

No	Kelompok Usia	Frekuensi	%
1	18 – 28 Tahun	2	5,88
2	29 – 39 Tahun	8	23,53
3	40 – 49 Tahun	15	44,12
4	50 – 59 Tahun	9	26,47
5	60 – 69 Tahun	0	0
6	70 Tahun Ke Atas	0	0
	Jumlah	34	100



3.1.6. Layanan yang digunakan responden

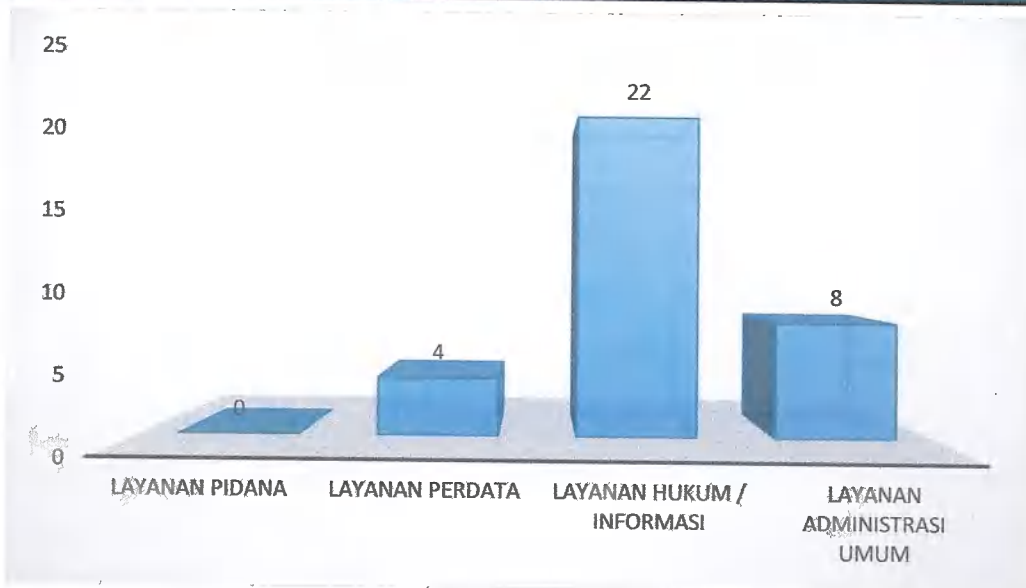
Dari sisi layanan yang digunakan oleh responden, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang menggunakan Layanan Hukum/Informasi sebesar 64,71% (enam puluh empat koma tujuh puluh satu persen) atau sejumlah 22 (dua puluh dua) orang.

Tabel 9.

Jenis layanan yang digunakan

Layanan yang digunakan responden

No	Jenis layanan	Frekuensi	%
1	Layanan Pidana	0	0
2	Layanan Perdata	4	11,76
3	Layanan Hukum / Informasi	22	64,71
4	Layanan Administrasi Umum	8	23,53
	Jumlah	34	100



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

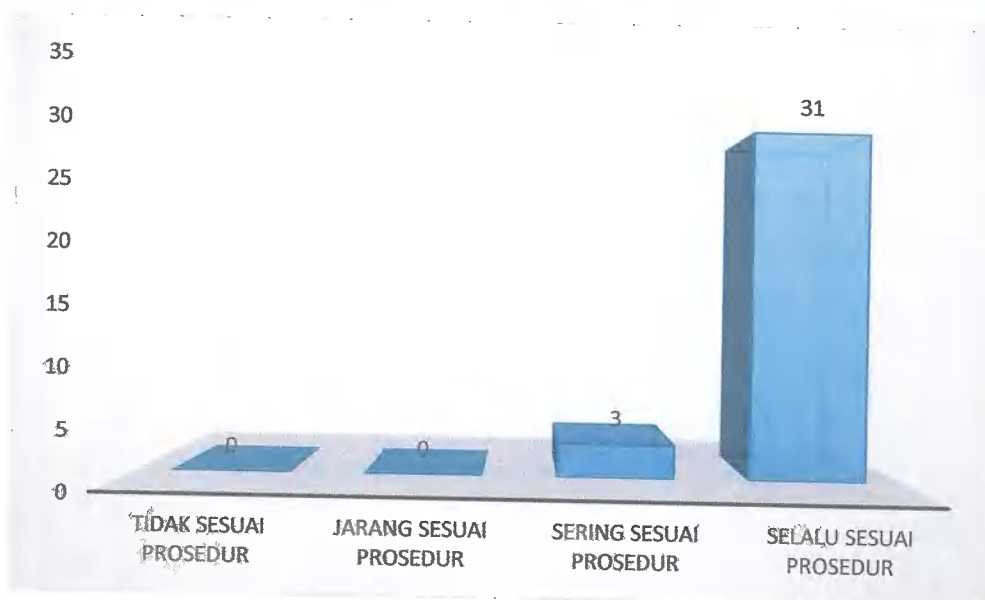
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) responden atau sebesar 91,18% (Sembilan puluh satu koma delapan belas persen) menyatakan selalu sesuai prosedur. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan;

Tabel 10.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Skor	Manipulasi Peraturan	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Sesuai Prosedur	0	0
2.	2	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
3.	3	Sering Sesuai Prosedur	3	8,82
4.	4	Selalu Sesuai Prosedur	31	91,18
Jumlah			34	100



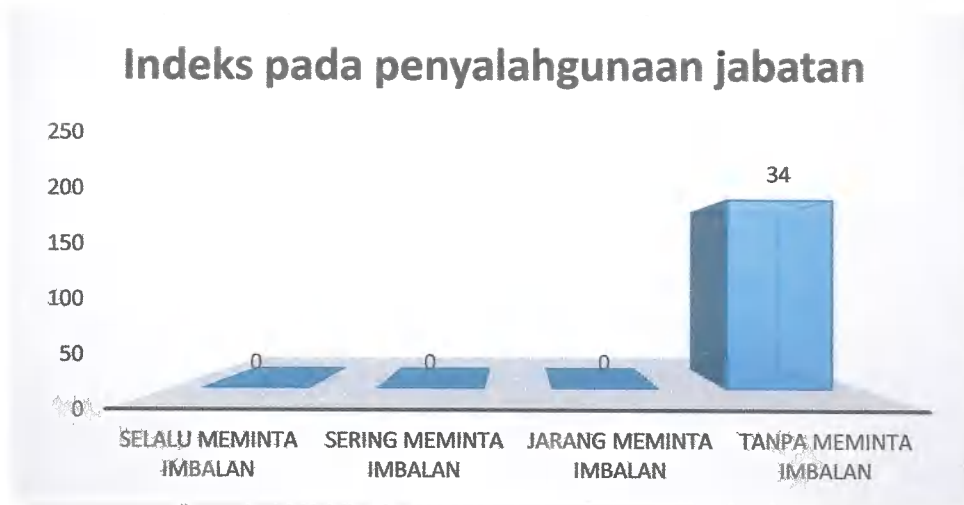
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan tanpa meminta imbalan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari penyalahgunaan jabatan

Tabel 11.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Skor	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu Meminta Imbalan	0	0
2.	2	Sering Meminta Imbalan	0	0
3.	3	Jarang Meminta Imbalan	0	0
4.	4	Tanpa Meminta Imbalan	34	34
Jumlah			34	100



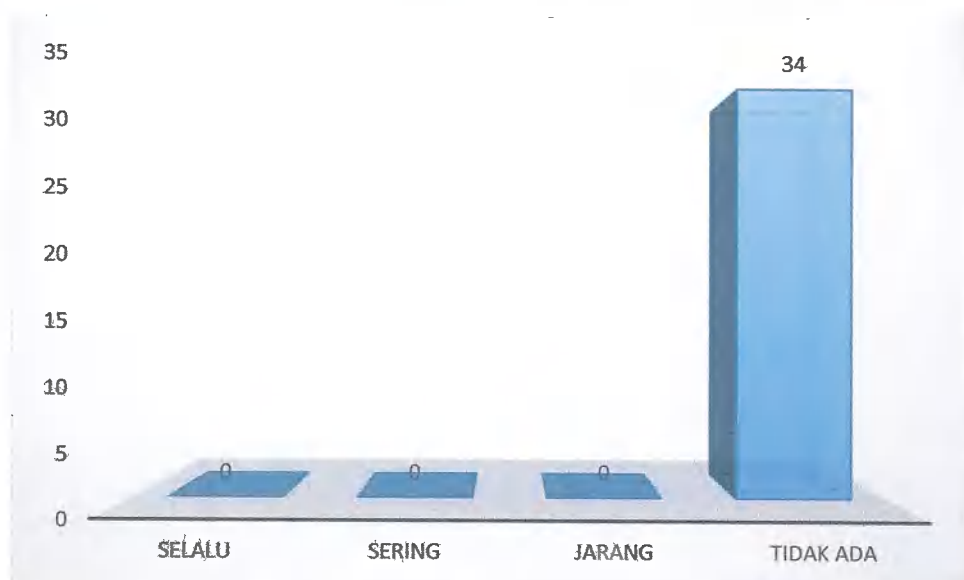
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan tidak ada. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menjual pengaruh

Tabel 12.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Skor	Menjual Pengaruh	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	34	34
Jumlah			34	100



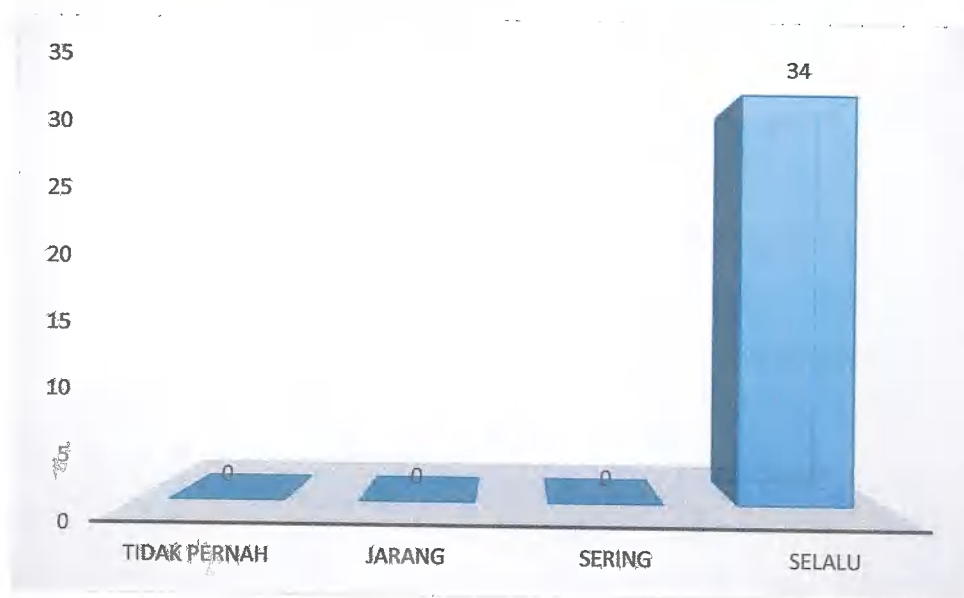
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan selalu mudah mendapat informasi tarif/biaya. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat mudah untuk mengakses transaksi dalam hal biaya;

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Skor	Transparansi Biaya	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Pernah	0	0
2.	2	Jarang	0	0
3.	3	Sering	0	0
4.	4	Selalu	34	100
Jumlah			34	100



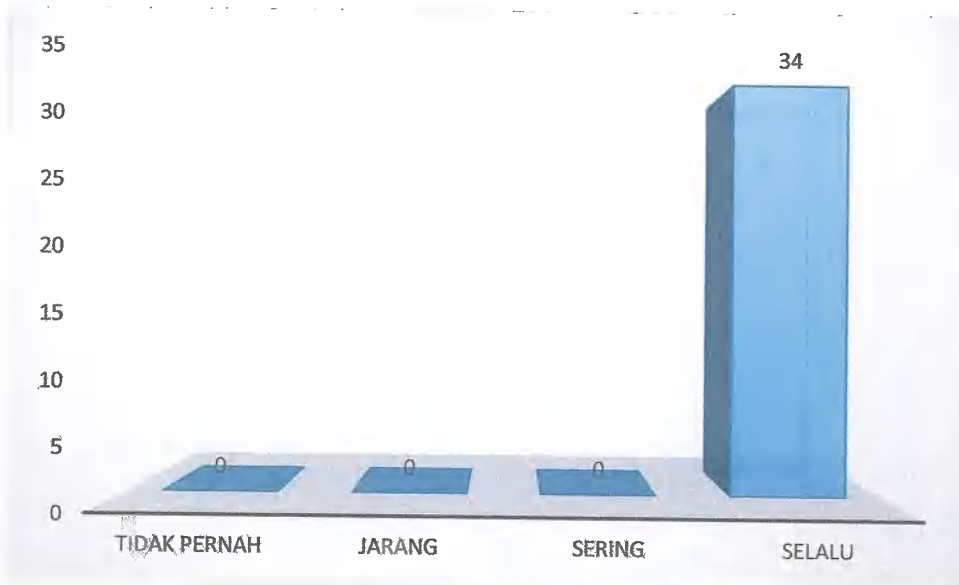
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak memungut biaya tambahan.

Tabel 15.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Skor	Tambahan biaya	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Pernah	0	0
2.	2	Jarang	0	0
3.	3	Sering	0	0
4.	4	Selalu	34	100
Jumlah			34	100



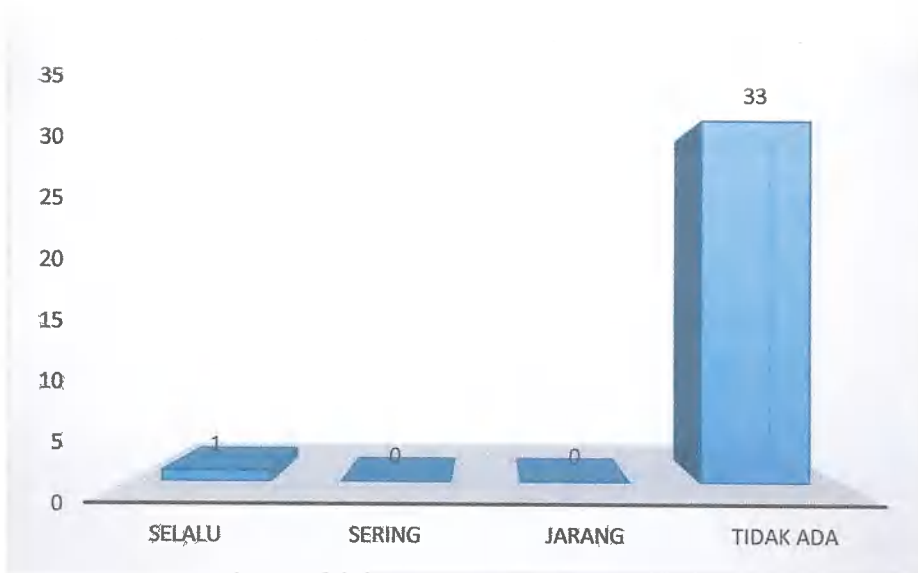
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) responden atau sebesar 97,06% (Sembilan puluh tujuh koma nol enam persen) menyatakan tidak ada yang memberikan tanda terima kasih. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah atas pelayanan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Skor	Indikator Hadiah	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	1	2,94
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	33	97,06
Jumlah			34	100



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

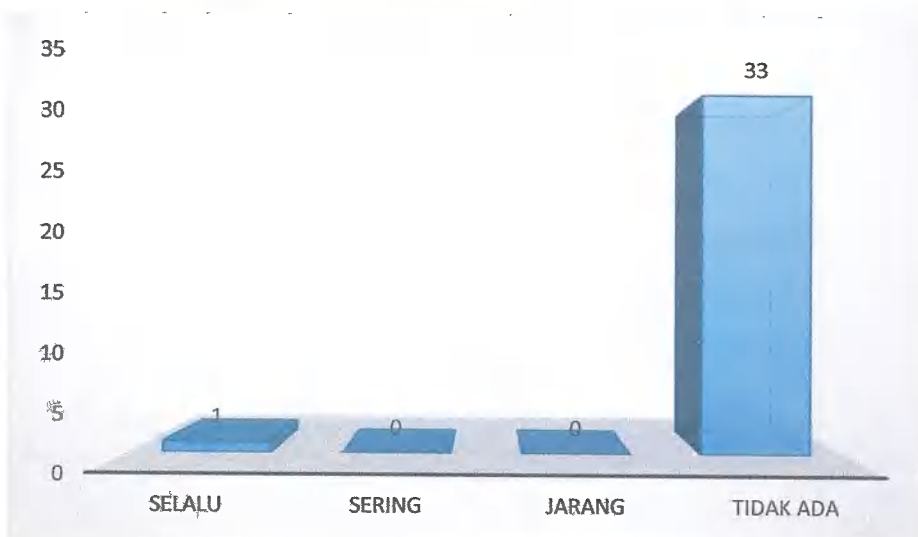
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan selalu menerima bukti transaksi pembayaran yang sah.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan telah melakukan transparansi pembayaran.

Tabel 17.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Skor	Transparansi Pembayaran	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Pernah	0	0
2.	2	Jarang	0	0
3.	3	Sering	0	0
4.	4	Selalu	34	100
Jumlah			34	100

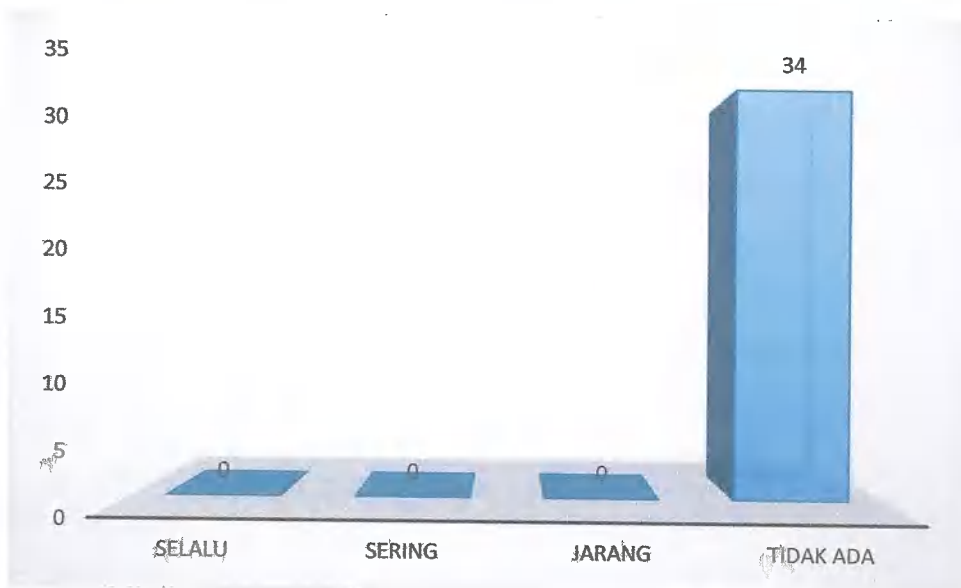


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan tidak ada yang pernah mengetahui praktek percaloan dalam pengurusan layanan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 18
Indeks pada indikator percaloan

No.	Skor	Indikator Percaloan	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	34	100
Jumlah			34	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

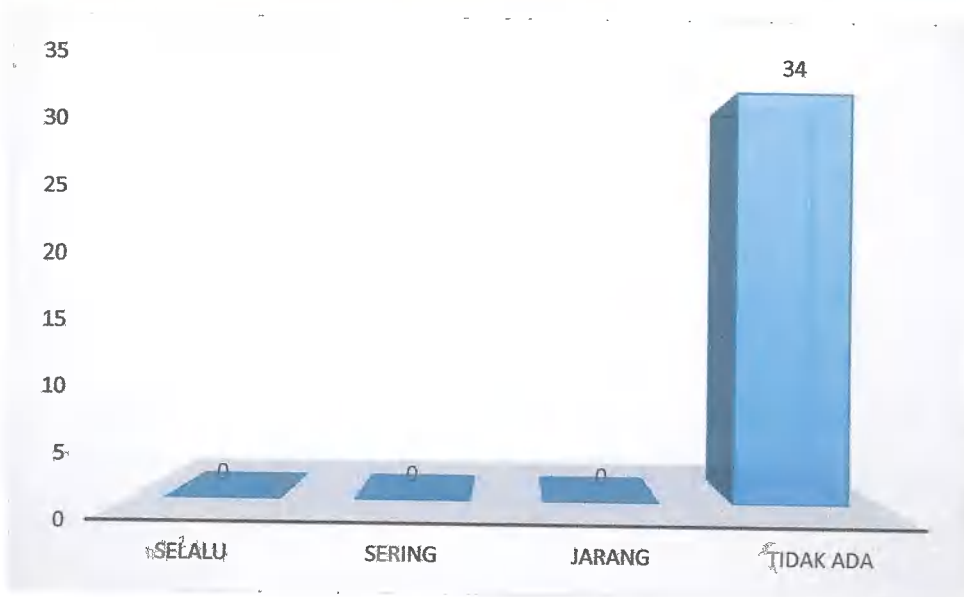
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan tidak ada yang pernah melihat atau mendengar masih terjadi praktek KKN. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan

Kerja pada pengadilan tidak melakukan perbuatan curang.

Tabel 19.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Skor	Perbuatan Curang	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	34	100
Jumlah			34	100



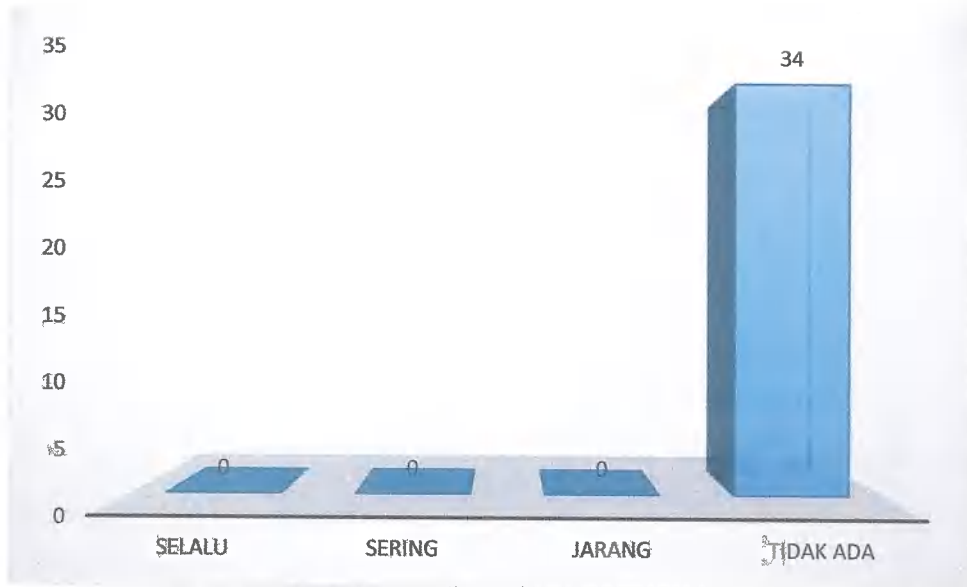
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden atau sebesar 100% (seratus persen) menyatakan tidak ada yang pernah mengurus perkara melalui aparaturnya pengadilan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak melakukan transaksi rahasia.

Tabel 14.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Skor	Transaksi Rahasia	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	34	100
Jumlah			34	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Cikarang sebesar **3,99** (tiga koma sembilan puluh sembilan) atau **99,71%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen);

Tabel 20.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Peringkat
1	Biaya Tambahan	4,00	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	2
3	Percaloan	4,00	3
4	Transaksi Rahasia	4,00	4
5	Perbuatan Curang	4,00	5
6	Menjual Pengaruh	4,00	6
7	Transparansi Pembayaran	4,00	7
8	Transparansi Biaya	4,00	8
9	Manipulasi Peraturan	3,97	9
10	Hadiah	3,91	10

Dari nilai **3,99** (tiga koma sembilan puluh sembilan) tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,71%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen) (81.26 – 100.00);

Tabel 21.
Nilai Persepsi Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 18.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada pengadilan**

No	Nama/Kode Responden	Kesan & Pesan	Waktu Rekam
1	Dini R-401915-IPAK-F2BD078961 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Untuk fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Cikarang sangat bagus	Rabu, 21 Juni 2023 15:07:30 WIB
2	Suherman R-401915-IPAK-ABFFD1CE25 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Semua pelayanan melaksanakan tugas sesuai kewenangan	Rabu, 21 Juni 2023 14:55:43 WIB
3	Defana M. Nur R-401915-IPAK-4CBF9328A1 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan baik	Selasa, 20 Juni 2023 11:01:05 WIB
4	Aris Jatmiko R-401915-IPAK-F4CB883679 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanannya baik	Selasa, 20 Juni 2023 10:08:45 WIB
5	Sahi Saman Hudi R-401915-IPAK-5E31D6091C PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Petugas bagus	Selasa, 20 Juni 2023 09:08:20 WIB
6	Sahi Saman Hudi R-401915-IPAK-A4AEDA3B0E PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Petugas baik	Selasa, 20 Juni 2023 09:03:40 WIB
7	Ahyar R-401915-IPAK-8750BAC092 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Kamis, 15 Juni 2023 13:50:01 WIB
8	Maradu Silitonga R-401915-IPAK-F7ADF1E8E5 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Baik	Rabu, 14 Juni 2023 11:38:41 WIB
9	Erna Yulia Puspitoyowati R-401915-IPAK-5C34696D7D PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Baik	Rabu, 14 Juni 2023 11:31:42 WIB
10	Nurzaenab R-401915-IPAK-DE9BFD8401 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Baik	Rabu, 14 Juni 2023 11:13:47 WIB
11	Andy Putranto R-401915-IPAK-A6EA2FC8B8 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Baik	Rabu, 14 Juni 2023 11:06:50 WIB
12	Deasy Anna Victorina R-401915-IPAK-9D44C63332 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Terimakasih telah dibantu pendaftaran gugatan	Senin, 12 Juni 2023 08:04:46 WIB
13	Ridho Pratama, SH R-401915-IPAK-84FFA4EE5E	Bagus	Selasa, 6 Juni 2023 14:07:09 WIB

	PENGADILAN NEGERI CIKARANG		
14	Isnandar A.P, SH R-401915-IPAK-D0D70339B2 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Rabu, 31 Mei 2023 10:04:03 WIB
15	Nixon R-401915-IPAK-BFFC75E7C5 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Senin, 29 Mei 2023 16:44:10 WIB
16	M Irfan R-401915-IPAK-82C8EBA18B PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Jumat, 26 Mei 2023 14:17:54 WIB
17	Melanda Desi R-401915-IPAK-80F056284C PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Jumat, 26 Mei 2023 11:35:36 WIB
18	Media Safitri,SH.,MH R-401915-IPAK-683ACE9B21 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Rabu, 24 Mei 2023 10:36:17 WIB
19	Khoirudin R-401915-IPAK-DD015B345E PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Selasa, 23 Mei 2023 15:18:08 WIB
20	Muhammad Firman R-401915-IPAK-8348658483 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Selasa, 23 Mei 2023 11:28:42 WIB
21	Anggiat,SH R-401915-IPAK-616006ABF9 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Senin, 22 Mei 2023 10:06:29 WIB
22	Manda M R-401915-IPAK-C61E5D35E5 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Senin, 15 Mei 2023 11:19:28 WIB
23	Surahmat R-401915-IPAK-DD82DD043D PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Selasa, 2 Mei 2023 11:16:45 WIB
24	Dion R-401915-IPAK-BA73523176 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Selasa, 18 April 2023 13:19:38 WIB
25	Hotdo Nauli R-401915-IPAK-F8AA5429E3 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Kamis, 13 April 2023 09:24:36 WIB
26	Lina Ruslinawati R-401915-IPAK-6F8BA1ADBC PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Rabu, 12 April 2023 13:11:42 WIB
27	Reza Lutfi R-401915-IPAK-71F00BF6D5	Bagus	Senin, 10 April 2023 10:49:38 WIB

	PENGADILAN NEGERI CIKARANG		
28	Wiradjegha R-401915-IPAK-3DEEB44CB2 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Senin, 10 April 2023 10:44:26 WIB
29	Ni Made Ekanadi R-401915-IPAK-6364EB701E PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanannya sangat transparan	Senin, 10 April 2023 09:25:35 WIB
30	Hadi Supriyono R-401915-IPAK-C78A4451B8 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Rabu, 5 April 2023 10:58:10 WIB
31	Yudhi Sabang R-401915-IPAK-OE74588CA3 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Rabu, 5 April 2023 10:53:25 WIB
32	Dr. TITI Masrifahati R-401915-IPAK-F996F236E7 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Selasa, 4 April 2023 11:17:09 WIB
33	Wawan P,SH.,MH R-401915-IPAK-FAB99D6C86 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Senin, 3 April 2023 14:09:03 WIB
34	Dimas NB,SH R-401915-IPAK-54EB10CD41 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Bagus	Senin, 3 April 2023 11:02:10 WIB

IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Cikarang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Cikarang memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,99** (tiga koma sembilan puluh sembilan) atau **99,71%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen), masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1	Manipulasi Peraturan	3,97
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Percaloan	4,00
4	Transaksi Rahasia	4,00
5	Perbuatan Curang	4,00
6	Menjual Pengaruh	4,00
7	Transparansi Pembayaran	4,00
8	Transparansi Biaya	4,00
9	Biaya Tambahan	4,00
10	Hadiah	3,91

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Cikarang Triwulan II Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) atau masuk pada persepsi Bersih Dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Indikator Hadiah** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530
 Telp (021) 89977188, Fax (021) 89977189
 Website : www.pn-cikarang.go.id, Email : info@pn-cikarang.go.id

No	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN										KET
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	135	136	136	136	136	133	136	136	136	136	
NRR Per RL	3,971	4,000	4,000	4,000	4,000	3,912	4,000	4,000	4,000	4,000	39,882
NRR Tertimbang	0,397	0,400	0,400	0,400	0,400	0,391	0,400	0,400	0,400	0,400	3,988
IPAK Unit Pelayanan											3,99